

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, 2012, *Asas-asas hukum pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2019, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2010, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 2002, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Rasyid, Roihan A., 2006, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Santoso, Urip, 2019, *Pendaftaran Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Cetakan Keenam, Prenada Media Group, Jakarta.
- Sembiring, Julius, 2016, *Tanah Negara: Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., 2004, *Naskah Akademik Rancangan Undang- undang tentang Sumber Daya Agraria (Penyempurnaan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria)*
- — — — —, dkk, 2011, *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia, Antara yang Tersurat dan Tersirat*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Supriadi, 2009, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Makalah, Tesis dan Disertasi

- Hadijah, Sitti, 2019, *Fungsi Kawasan Hutan dalam Perkembangan Desa dan Masyarakatnya di Kecamatan Segah Kabupaten Berau*, Tesis Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor
- Santoso, Rizaldi Eki 2014, *Pemanfaatan Tanah Bekas Kawasan Hutan Untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Studi Tentang Pasal 29 Ayat (5) Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dengan Peraturan Terkait Kawasan Hutan)*, diakses melalui <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/620>
- Sembiring, Julius, 2016, *Konstruksi Hukum Penguasaan Tanah Negara dalam Sistem Hukum Tanah Nasional*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

C. Artikel/ Jurnal

- Hannah Timmins, 2017, *Opsi Legal Perlindungan Hutan pada Lahan Zona Pertanian di Indonesia*, draft Laporan TFT (The Forest Trust), Jakarta.
- Ministry of Environment and Forestry Republic of Indonesia, 2020, *The State of Indonesias Forest Report 2020*.

D. Internet

www.bps.co.id

**P, Sofie Widyana, *Pembuktian Hak Lama Pada Pendaftaran Tanah*,
hukumproperti.com By Leks&Co, diakses pada Minggu, 31 Oktober 2021**

E. Peraturan Perundang-undangan

Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang- undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan

Undang- undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum

Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan, Hak Pakai Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan
Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban
Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan dan
Fungsi Kawasan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas
Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah
Telantar

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan;

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Badan
Pertanahan Nasional Nomor 364/Kpts-II/90, 519/Kpts/HK/050/70/90 dan Nomor:
23-VII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak
Guna Usaha Untuk Pengembangan Usaha Pertanian

Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999
tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak
Pengelolaan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 31 Tahun 2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan dalam Rangka Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan dalam Rangka Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Izin Pembuatan dan Penggunaan Koridor;
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.28/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.6/PKTL/SETDIT/KUM.1/10/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Survei Hutan Alam Primer dalam Rangka Verifikasi Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB).

F. SK Menteri Kehutanan RI

Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 17/Kpts-II/1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 13.532 Ha yang terletak di Kelompok Hutan S. Mempura – S. Polong, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Propinsi Daerah Tingkat I Riau untuk Perkebunan atas Nama PT. Duta Swakarya Indah.
— — — — — Nomor: SK.313/MENHUT-II/2021 tentang Pelepasan Kawasan HPK untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit atas Nama PT.Medcopapua Hijau Selaras.

G. Wawancara

Putra, Sugama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, wawancara dilakukan pada 18 Juli 2021 dengan *Whatsapp Messenger*.
Safitri, Wiwiek Eko, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, wawancara dilakukan pada tanggal 28 Mei 2021 via online dengan *Zoom Meeting*.
— — — — —, wawancara dilakukan pada tanggal 24 Juni 2021 via online dengan *Zoom Meeting*.

H. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 07/Pdt.G/2012/PN-Siak *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 59/Pdt/2013/PTR *jo* Putusan Kasasi MA



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Status Kepemilikan Tanah yang Berasal dari Pelepasan Kawasan Hutan

GHASSANI IRSIA K, Dr. Rikardo Simarmata, S.H.

Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Nomor 2848 K/Pdt/2013 *jo* Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Nomor 158 PK/Pdt/2015.

Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Sak *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 184/PDT/2017/PT PBR *jo* Putusan Kasasi MA Nomor 2380 K/Pdt/2018 *jo* Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Nomor 933 PK/PDT/2020.